



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ACHMADI**
2. Jabatan : **KETUA LEMBAGA**
3. NHK : **13244**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/129 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/120 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/255 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/96 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 632.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOBIL, TOYOYA INOVA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 33.850.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 14.979.472**



## F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

## Sub Total

Rp. 5.230.829.472

## III. HUTANG

Rp. 143.303.416

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.087.526.056

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MAHYUDIN
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 546758

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 792.000.000

1. Tanah Seluas 264 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 792.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 662.185.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJSPO2.4L. DAKL 4X28 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 635.400.000
3. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 23.785.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 152.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 21.656.236

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 866.811.639

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 10.000.000

**Sub Total** Rp. 2.505.152.875

**III. HUTANG** Rp. 1.583.881.256

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 921.271.619

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUSILANINGTIAS
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 672583

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 980.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR,  
HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 8.000.000

1. MOTOR, YAMAHA GEAR GEAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 40.070.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.209.814

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.030.279.814

**III. HUTANG** Rp. 322.073.776

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 708.206.038

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SRI SUPARYATI**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **968820**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 480.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 806.200.000**

1. MOTOR, HONDA NC11CF1C AT Tahun 2013, HIBAH TANPA AKTA Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA ACB2J21B02 AIT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA NC11D1CFAIT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.200.000
4. MOBIL, HONDA HONDA BR-V 1,5 E CVT CRD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 146.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ GR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 509.000.000
6. MOBIL, SUZUKI NEW CARRY PU FDAC PS Tahun 2023, LAINNYA Rp. 135.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 84.279.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 585.437.047**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. 61.738.724**

**Sub Total** **Rp. 2.017.654.771**



III. HUTANG

Rp. 414.942.700

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.602.712.071

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SRI NURHERWATI
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 964771

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/101 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **515.600.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA GL Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA 150 RR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G A Tahun 2024, LAINNYA Rp. 389.100.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **79.500.000**

**D. SURAT BERTAHAP** **Rp.** **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **82.933.875**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----**

**Sub Total** **Rp.** **1.828.033.875**

**III. HUTANG** **Rp.** **351.568.165**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

**1.476.465.710**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

**UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANTONIUS PRIJADI SOESILO WIBOWO**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA**
3. NHK : **626102**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.529.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/233 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.059.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.470.700.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 457.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 457.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 9.400.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 251.722.261**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

**Sub Total** **Rp. 4.248.522.261**

**III. HUTANG** **Rp. 373.625.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 3.874.897.261**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : WAWAN FAHRUDIN
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 964582

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 848.400.000

1. MOTOR, SCOOPY HONDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 641.400.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 10.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 916.280

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.284.316.280

**III. HUTANG** Rp. 695.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 589.316.280

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.